



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Inspektorat Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Inspektorat Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Inspektorat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Inspektorat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Inspektorat Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 42**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja yang selanjutnya di singkat dengan RENJA merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja ini menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam rangka mencapai visi misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka ini akan menjadi suatu instrumen dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Garut dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat serta merupakan dukurangan terhadap arah kebijakan pembangunan Kabupaten

Garut Tahun 2022 yang bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut merupakan implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), yang kemudian tata cara penyusunan dan sistemika penulisan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Garut menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan pagu dana indikatif serta sumber dananya.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - j. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
- q. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
- r. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi misi jangka menengah daerah Kabupaten Garut.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penysusunan RENJA Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Garut agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Kabupaten Garut;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Ulasan atas hasil review dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2022.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 memuat 8 (delapan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.400.957.625,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.474.392.138,00. Untuk menilai capaian kinerja keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi “sangat tinggi” yaitu capaian berkisar antara 91 – 100 %, “Tinggi” capaian berkisar antara 76 - 90%, “sedang” capaian berkisar antara 66 – 75 %, “rendah” berkisar antar 50 -65%, dan “sangat rendah” dengan capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020, terdapat 23 kegiatan yang dengan status capaian “Sangat Tinggi” (52%), 13 kegiatan dengan status capaian “Tinggi” (30%), 1 kegiatan kegiatan dengan status capaian “Sedang” (2%), 1 kegiatan dengan status capaian “Rendah” (2%), dan 6 kegiatan dengan status “Sangat Rendah” (14%).

Pencapaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2020 dengan status “Rendah” dan “Sangat Rendah”, yaitu terdapat pada kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Kabupaten, Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah, Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pelaksanaan Pengawasan Prioritas Nasional, Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Survey Penilaian Integritas, dikarenakan oleh pada Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya penetapan pembatasan aktivitas kegiatan dan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat bahkan tidak dapat dilaksanakan dan berimbas terhadap penyerapan anggaran rendah bahkan pemangkasan anggaran kegiatan.

Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan, terdapat 42 kegiatan yang dengan status capaian “Sangat Tinggi” dan 2 kegiatan berstatus capaian “Sangat Rendah”, yaitu Kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kegiatan Survey Penilaian Integritas tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terhambat oleh pandemic COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya penetapan pembatasan interaksi dalam aktivitas kegiatan dan koordinasi secara langsung terhambat. Penyerapan anggaran dengan kinerja keuangan yang bervariasi, namun kinerja output kegiatan tetap dapat terlaksana.

Gambar 2.1



Gambar 2.2



Tabel 2.1
Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN Setelah Perubahan	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I	BELANJA DAERAH	28.086.015.467	22.911.845.519	82.00%
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.685.057.842	13.437.453.381	98.19%
1	Gaji dan Tunjangan	6.538.481.671	6.488.476.374	99.24%
2	Belanja Tunjangan Kinerja Daerah	7.146.576.171	6.948.977.007	97,24%
III	BELANJA LANGSUNG	14.400.957.625	9.474.392.138	81.67%
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.889.171.000	2.644368.006	91.53%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, & listrik	138.000.000	98.054.776	71.05%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	15.000.000	12.005.600	80.04%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	126.600.000	126.336.128	99.79%
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000	24.915.000	99.66%
6	Penyediaan Alat tulis Kantor	165.000.000	157.796.700	96.63%
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	162.500.000	147.444.000	90.73%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	100%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.711.841.000	1.616.580.798	94.44%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000	10.858.000	98.80%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.980.000	99.80%
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	106.230.000	106.230.000	100%
13	Penyediaan Jasa Keamanan	150.000.000	149.576.504	99.72
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	160.000.000	136.140.500	99.71%
15	Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah	95.000.000	35.440.000	37.31%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.137.550.000	3.063.630.332	97.64
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.190.550.000	2.122.712.000	96.90%
2	Pengadaan Mebelair	212.000.000	211.459.670	99.75%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75.000.000	74.268.720	99.02%
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	340.000.000	338.547.542	99.57%
5	Penataan Ruang Gedung Kantor	220.000.000	219.404.000	99.73%
6	DED Gedung Kantor	100.000.000	97.238.400	97.24%

III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	179.000.000	175.361.000	97.97
1	Pengadaan Batik	99.000.000	97.311.000	98.29%
2	Pengadaan Pakaian Olahraga	80.000.000	78.050.000	97.56%
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	112.000.000	98.127.800	87.61
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	18.465.000	73.86%
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12.000.000	9.250.000	77.08%
3	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	25.000.000	20.575.000	82.30%
4	Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat	50.000.000	49.837.800	99.68%
V	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	501.170.000	415.582.500	82.92
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	500.000.000	414.412.500	82.88%
2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	1.170.000	1.170.000	100%
VI	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	6.820.926.625	2.474.242.500	36.27
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (DID)	2.511.225.000	1.114.261.000	44.37%
2	Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	618.285.000	260.171.500	44.08%
3	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	362.567.125	282.585.000	77.94%
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Kabupaten	214.120.000	115.800.000	54.08%
5	Pelaksanaan Pengawasan Prioritas Nasional (DID)	2.233.909.500	126.300.000	5.65%
6	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP PEMDA) dan Evaluasi SAKIP	137.860.000	112.660.000	81.72%
7	Reviu Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	255.490.000	193.550.000	75.76%
8	Reviu Dokumen Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah	156.160.000	135.580.000	86.82%
9	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	173.000.000	133.335.000	77.07%
10	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP	158.310.000	0	0
VII	PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS	633.490.000	496.605.000	78.39
1	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	204.820.000	194.110.000	94.77%
2	Survey Penilaian Integritas	120.000.000	0	0

3	Penilaian Internal Zona Integritas	58.670.000	53.840.000	91.77%
4	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar	250.000.000	248.655.000	99.46%
VIII	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	127.650.000	106.475.000	83.41
1	Pembuatan SIMWASDA, SIPTL dan Sistem Informasi lainnya Pendukung Pengawasan	127.650.000	106.475.000	83.41%

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2020 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2019-2024 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- I. Meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat
 1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 2. Persentase SKPD yang Nilai SAKIP nya minimal “BB”
 3. Persentase pengaduan yang tertangani
- II. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
 1. Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP
- III. Meningkatnya penerapan sistem integritas
 1. Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi
- IV. Meningkatnya kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP)
 1. Level Kapabilitas APIP

Keberhasilan capain kinerja tahun 2020 di dukung oleh sejumlah program prioritas sebagai berikut sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Penegakan Integritas
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 78,83%
2. Persentase SKPD yang Nilai SAKIP nya minimal “BB” sebesar 45,33%
3. Persentase pengaduan yang tertangani sebesar 100%
4. Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP sebesar 0%
5. Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi sebesar 77,04%
6. Level Kapabilitas APIP mencapai Level 3

Dari 4 sasaran dan 6 indikator kinerja utama tersebut bahwa 1 indikator kinerja utama, “Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan”, capaian kinerjanya telah melebihi target yang sudah ditetapkan, yaitu 105,11% dengan kriteria “istimewa”, 3 indikator mencapai target yang telah ditetapkan yaitu indikator Persentase pengaduan yang tertangani, Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi, Level Kapabilitas APIP dengan kriteria “sangat memuaskan”, sedangkan 2 indikator lainnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu indikator Persentase SKPD yang nilai SAKIP nya minimal “BB” dengan capaian sebesar 60,44% berkriteria “Baik” dan indikator Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP dengan capaian 0% berkriteria “Sangat kurang”, capaian 2 indikator ini tidak dapat mencapai target dikarenakan terhambat oleh terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya penetapan pembatasan interaksi dalam aktivitas kegiatan sehingga koordinasi secara langsung

terhambat serta dilakukannya refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 sehingga anggaran kegiatan untuk kegiatan implementasi SPIP ditiadakan.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Masih mengikuti Permendagri No. 64 Tahun 2013 untuk Tahun Anggaran 2020										
4.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	98,04%	100 %	89%	89%			
4.01.001.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat masuk dan keluar	6000 buah	-	1200 buah	1200 buah	100%			
4.01.001.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	4 Jenis	12 Bulan	4 Jenis	4 Jenis	100%			
4.01.001.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Surat Ijin Kendaraan Dinas/Operasional	110 STNK	10 Mobil dan 12 Motor	22 STNK	22 STNK	100%			
4.01.001.0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	20 Orang	12 Bulan	4 Orang	4 Orang	100%			
4.01.001.0009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	3 Jenis dan 260 Buah Jenis/Buah	3 Jenis	3 Jenis dan 52 Buah	3 Jenis dan 52 Buah	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.001.0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	55 Jenis	59 Jenis	55 Jenis	55 Jenis	100%			
4.01.001.0011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis Cetakan, 1505000 Lembar Coy dan 1250 Jilid Cover	Cetak 7 Jenis, Penggandaan 325.311 Lembar	7 Jenis Cetakan, 375000 Lembar Copy dan 500 Jilid Cover	7 Jenis Cetakan, 337500 Lembar Copy dan 470 Jilid Cover	95%			
4.01.001.0012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis 664 Buah)	6 Jenis 125 buah	8 Jenis (132 Buah)	8 Jenis (132 Buah)	100%			
4.01.001.0013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	19 Jenis	11 Jenis	26 Jenis	26 Jenis	100%			
4.01.001.0014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	4 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100%			
4.01.001.0015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	3 Jenis	360 Eksemplar	3 Jenis	3 Jenis	100%			
4.01.001.0017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	27750 Per Orang	2950 Orang	5550 Per Orang	5550 Per Orang	100%			
4.01.001.0033	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan	30 Orang	-	6 Orang	6 Orang	100%			
4.01.001.0092	Rapat-rapat Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1468 OH	12 Bulan	150 OH	128 OH	21%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.001.0094	Rapat-rapat Pembinaan Ke Dalam Daerah	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas rapat-rapat dan pembinaan ke dalam daerah	1168 OH	12 Bulan	368 OH	137 OH	12%			
4.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	98,80%	100 %	100%	100%			
4.01.002.0003	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2	7 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	1 unit	7 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2	7 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2	100%			
4.01.002.0010	Pengadaan Meubeulair	Jumlah Mebeleur	3 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100%			
4.01.002.0024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	148 Unit	10 unit dan 12 unit	10 Unit R4 dan 10 Unit R2 Unit Roda 4 dan Unit Roda 2	10 Unit R4 dan 10 Unit R2 Unit Roda 4 dan Unit Roda 2	100%			
4.01.002.0042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Gedung	1 Gedung	5 Ruangan	5 Ruangan	100%			
4.01.002.0068	Penataan Ruang Gedung Kantor	Jumlah penataan ruang gedung kantor	29 Ruangan	4 Ruang	7 Ruangan	7 Ruangan	100%			
4.01.002.0180	DED Gedung Kantor	Jumlah dokumen DED	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%		100%	100%	100%			
4.01.005.0098	Pengadaan Pakaian Batik	Jumlah Pakaian Batik	880 Buah		330 Stel	330 Stel	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.005.0099	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga	220 Buah		200 Stel	200 Stel	100%			
4.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	95%	-	75%	100%	100%			
4.01.006.0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	30 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%			
4.01.006.0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.006.0010	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Dokumen Renja	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.006.0043	Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei	20 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%			
4.01.021	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pemenuhan Infrastruktur kebijakan peningkatan kapabilitas APIP	3 Level	78,74%	3 Level	100%	100%			
4.01.021.0001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan	42 Kali	-	2 Kali	2 Kali	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.021.0002	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Pelatihan yang Diikuti	33 Jenis Diklat	-	1 Jenis Diklat	1 Jenis Diklat	100%			
4.01.066	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	95%	82,96%	75%	78,83%	105,11%			
		Persentase SKPD yang nilai SAKIP-nya minimal BB	95%	70%	75%	45,33%	60,44%			
		Persentase Pengaduan yang tertangani lingkup Irban I, II, III dan IV	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP	100%	58,68%	50%	0%	0%			
4.01.066.0001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (DID)	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	2.495 LHP	166 Dokumen	499 LHP	474 LHP	95%			
4.01.066.0002	Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut	2.495 BAT	475 Dokumen	499 BAT	499 BAT	100%			
4.01.066.0003	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	3 Jenis Dokumen		6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.066.0004	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Kabupaten	Jumlah Rakor Pengawasan yang Dilaksanakan dan Diikuti	15 Kali	1 Dokumen	1 Kali	1 Kali	100%			
4.01.066.0005	Pelaksanaan Pengawasan Prioritas Nasional (DID)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Prioritas Nasional	3 Jenis Dokumen	-	3 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	67%			
4.01.066.0009	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP PEMDA) dan Evaluasi SAKIP	Jumlah Laporan Hasil Reviu	451 LHR	77 Dokumen	151 LHR	151 LHR	100%			
4.01.066.0010	Reviu Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 Jenis LHR	5 Dokumen	4 Jenis LHR	4 Jenis LHR	100%			
4.01.066.0011	Reviu Dokumen Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu	375 LHR	-	75 LHR	75 LHR	100%			
4.01.066.0015	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengaduan yang Dilayani	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	67%			
4.01.066.0016	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP	Jumlah SKPD melaksanakan SPIP	Jumlah SKPD melaksanakan SPIP	77 Dokumen	38 Unit Kerja	-	0%			
4.01.067	Program Penegakan Integritas	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	87%	43,12%	84%	77,04%	91,71%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.067.0001	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	20 Kegiatan	4 Dokumen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%			
4.01.067.0002	Survey Penilaian Integritas	Jumlah Survei Penilaian Integritas	5 Kali	1 Kali	1 Kali	-	0%			
4.01.067.0003	Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah SKPD yang Difasilitasi dalam Pemenuhan ZI WBK dan WBBM	375 SKPD/Instansi	14 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100%			
4.01.067.0004	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar	10 Kegiatan	4 Dokumen	2 jenis	2 jenis	100%			
4.01.068	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi	100%	0%	100%	100%	100%			
4.01.068.0001	Pembuatan SIMWASDA, SIPTL dan Sistem Informasi lainnya Pendukung Pengawasan	Jumlah Sistem Informasi yang Dibuat	10 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
Mengikuti Permendagri No. 90 Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2021										
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP						70%	52%	74,29%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan						6 Jenis	6 Jenis	50,00%
6.01.02.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender						75 Laporan	-	0,00%
		2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan						3 Jenis	1 Jenis	0,33%
		3. Jumlah Laporan Hasil Reviu						5 Jenis	1 Jenis	20,00%
		4. Jumlah LHE						4 Jenis	1 Jenis	25,00%
6.01.02.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan						2 Jenis	1 Jenis	50,00%
		2. Jumlah LHR						7 Jenis	1 Jenis	14,29%
6.01.02.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR						1 Laporan	1 Laporan	100,00%
6.01.02.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR						2 Jenis	2 Jenis	100,00%
6.01.02.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan						421 LHP	98 LHP	23,28%
6.01.02.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut						499 BAT	74 BAT	14,83%
6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu						8 Jenis		13%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu						8 Jenis	1 Jenis	13%
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase MCP KPK						85%	-	21%
6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rakorwas yang dilaksanakan dan diikuti						3 Laporan	-	0%
6.01.03.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis						3 Laporan	-	0%
6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan						4 Kegiatan	-	50%
6.01.03.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen Risiko						2 Jenis	-	0%
6.01.03.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumenn Hasil Evaluasi						1 Dokumen	-	0%
6.01.03.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi						2 Jenis	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		2. Jumlah kegiatan sapu bersih pungutan liar						2 Jenis	1 Jenis	65%
6.01.03.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi						3 Jenis	1 Jenis	33%
		2. Jumlah Survei Penilaian Integritas						1 Kali	-	0%
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Level Kapabilitas APIP						Level 3	-	0%
6.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen						19 Dokumen	-	0%
6.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan						8 Dokumen	1 Dokumen	13%
6.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Survei						1 Dokumen	-	0%
		2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja						6 Dokumen	-	0%
6.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan						95 Orang	-	30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan						95 Orang	95 Orang	30%
6.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan						1 Dokumen	-	0%
6.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Keamanan						6 Orang	-	0%
6.01.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan						6 Orang	-	0%
6.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Aspek Penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah						2 Jenis	-	30%
6.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Lapangan						110 Buah	-	17%
		2. Jumlah Pakaian Batik						240 Buah	-	0%
		3. Jumlah Pakaian Korpri						110 Lembar	-	0%
		4. Jumlah Pakaian Olahraga						110 Stel	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Auditor yang Mengikuti Sertifikasi Profesi						10 Orang	-	0%
		2. Jumlah Pelatihan yang diikuti						5 Jenis Diklat	-	0%
		3. Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan						7 Kali	1 Kali	14%
6.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi umum perangkat daerah						7 Jenis	7 Jenis	0%
6.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7 Jenis	2 Jenis	28,57%
6.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor						59 Jenis	26 Jenis	44,07%
6.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga						7 Jenis	7 Jenis	100,00%
6.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Barang Cetak						7 Jenis	1 Jenis	14,29%
		2. Jumlah Penggandaan /FC						370.582 Lembar	34.942 lembar	9,43%
6.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar						3 Jenis	3 Jenis	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		2.Jumlah Publikasi di Media Cetak						5 Kali	1 Kali	20,00%
6.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman						10.600 Orang	1.946 orang	18,36%
6.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						300 OH	38 OH	12,67%
		2. Jumlah Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah						200 OH	4 OH	2,00%
6.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-	-	
6.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeulair						-	-	
6.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4 Jenis	3 Jenis	100%
6.01.01.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat/materai						1200 Buah	300 Buah	25,00%
6.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4 Jenis	4 Jenis	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang Diperbaiki						36 Unit	4 Unit	11,11%
6.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Tenaga Kebersihan						3 Orang	-	0,00%
		2. Jumlah Alat Kebersihan						6 Per Ruang	-	
6.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah						3 Jenis	2 Jenis	50%
6.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional						38 Unit	7 Unit	18,42%
		2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan						5 Unit	1 Unit	20,00%
		3. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan						9 Unit	1 Unit	20,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun						1 Gedung	-	0,00%

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Dari tabel 2.2 di atas diketahui bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang telah mencapai target akhir Renstra, yaitu Persentase Pengaduan yang tertangani tepat mencapai 100% target akhir Renstra. 5 (lima) indikator kinerja lainnya, yaitu Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Persentase SKPD yang nilai SAKIP nya minimal “BB”, Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi, Level Kapabilitas APIP tidak mencapai target yang telah ditetapkan di akhir Renstra. Pencapaian kinerja Tahun 2020 masih merupakan Tahun pertama di dalam Renstra periode Tahun 2019-2024.

Dalam hal ini bagi indikator kinerja yang telah mencapai target Renstra perlu untuk mempertahankan pencapaian kinerja tersebut dan untuk yang belum mencapai target akhir Renstra perlu dilakukan peningkatan kinerja pada Rencana Strategis di tahun mendatang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pengawasan, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27), dan sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 144 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah dituntut untuk selalu dinamis dengan mengadakan berbagai penyesuaian dan perubahan serta berorientasi pada pembaharuan terutama melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang tentunya ini menjadi tugas berat yang diemban oleh seorang pimpinan Inspektorat Daerah, dalam hal ini adalah Inspektur Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, Inspektur Daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun fungsi yang diemban oleh Inspektur Daerah, dalam mewujudkan tugas pokok tersebut Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dibantu oleh unit kerja yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan tugas pokok tujuan organisasi, antara lain :

- a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
dan
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- 5) Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu di bantu oleh kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD), dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawain.

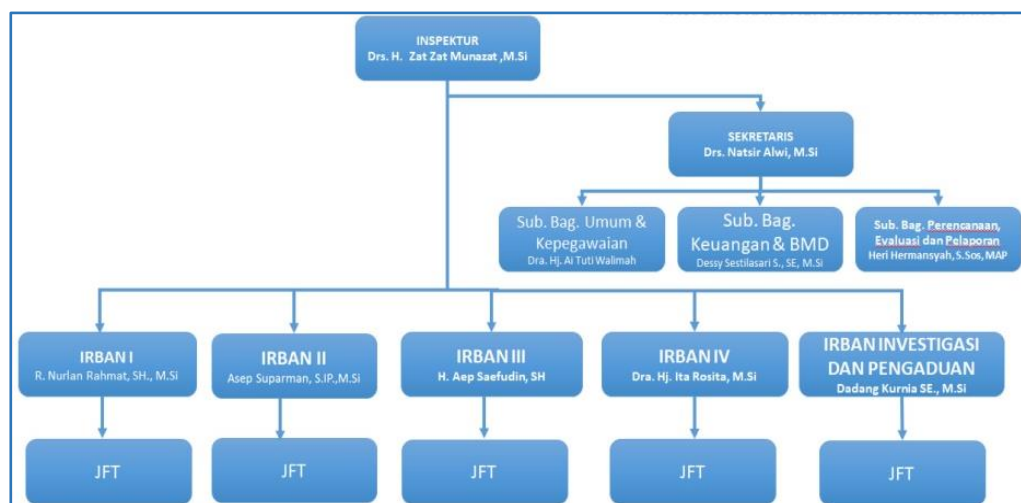
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya. Dan untuk jenjang dan jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 sebagai berikut :

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut:



Berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, komposisi pegawai Inspektorat Daerah Garut per Desember 2020 :

1. Komposisi SDM Inspektorat

Sebaran sumber daya pegawai yang ada di unit kerja Inspektorat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

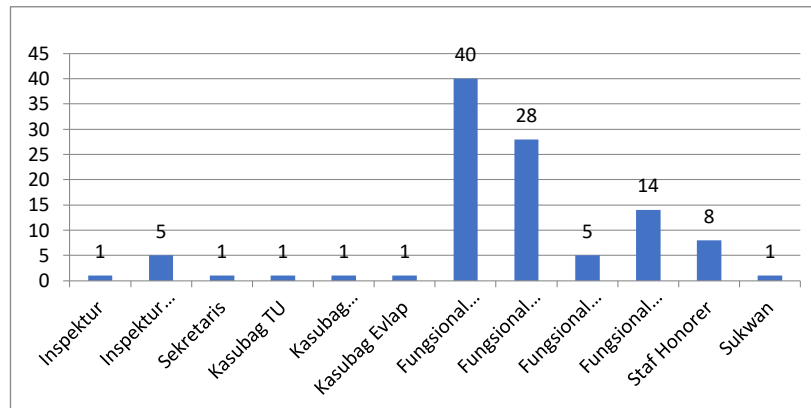
Tabel 2.3
Komposisi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Garut

No.	Status	Jumlah (Orang)
1.	Jenjang Struktural	10
2.	Fungsional Auditor	40
3.	Fungsional P2UPD	28
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	5
5.	Fungsional Umum	14

6.	Staf Honorer	8
7.	Sukwan	1

2. Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat

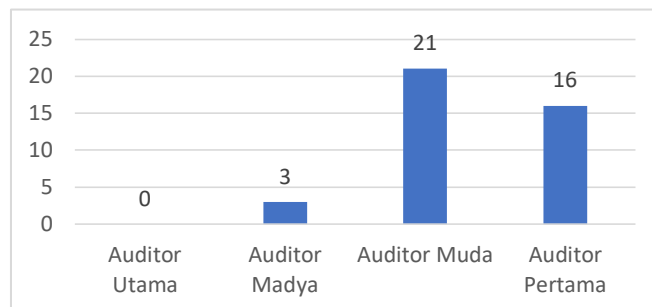
Gambar 2.4
Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat



3. Jabatan Fungsional Auditor

Komposisi jabatan fungsional auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

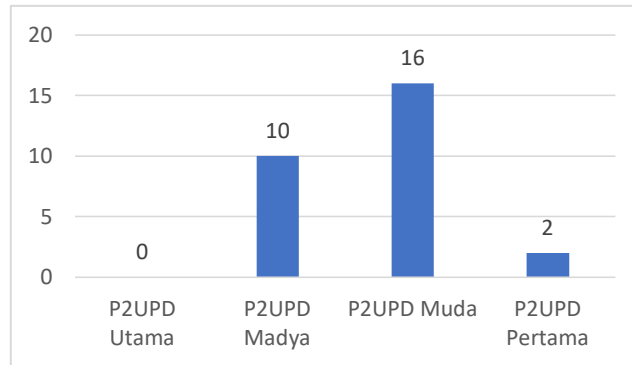
Gambar 2.5
Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat



Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan auditor pertama. Dengan demikian, dalam tim mandiri penugasan kepada ketua tim banyak diperankan sebagai anggota tim untuk memenuhi komposisi anggota dalam tim mandiri.

4. Jabatan Fungsional P2UPD

Gambar 2.6
Komposisi Jabatan Fungsional P2UPD Inspektorat

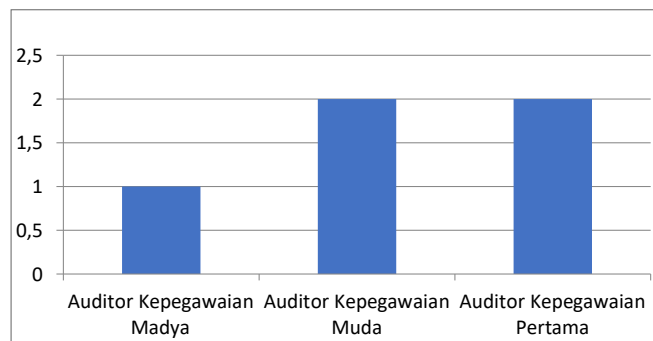


Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan P2UPD pertama. Dengan demikian, dalam tim mandiri penugasan kepada ketua tim banyak diperankan sebagai anggota tim untuk memenuhi komposisi anggota dalam tim mandiri.

5. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Komposisi jabatan fungsional auditor kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

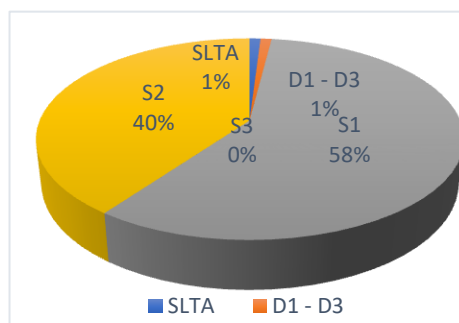
Gambar 2.7
Komposisi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Inspektorat



Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan auditor kepegawaian pertama. Dengan demikian, dalam tim mandiri penugasan kepada ketua tim banyak diperankan sebagai anggota tim untuk memenuhi komposisi anggota dalam tim mandiri.

6. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

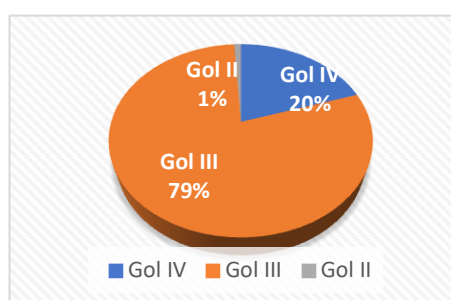
Gambar 2.8
Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 40% telah menyelesaikan pendidikan S2, dan 58 % berpendidikan S1, 1% berpendidikan D3 dan 1% berpendidikan SLTA.

7. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Gambar 2.9
Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang



Komposisi pegawai di Inspektorat berdasarkan golongan, sebanyak 20 orang (20%) berada pada golongan IV, 79 orang berada pada golongan III (79%) dan golongan II sebanyak 1 orang (1%).

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Garut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dikaitkan dengan target dalam Renstra Inspektorat Daerah.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Garut

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Inspektorat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Pengawasan		Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	
2	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan peran Inspektorat sebagai sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pengawasan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun eksternal lembaga, antara lain:

1. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan, dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat;
2. Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintah yang menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan/pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
3. Masih terbatasnya tenaga yang professional dibidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya kesulitan dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPKP serta Jabatan P2UPD.
4. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.
5. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.
6. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan Masih rendahnya tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

7. Masih ada ASN yang mempunyai sikap Mental dan Budaya Korupsi serta Upaya dan komitmen Pemerintah Daerah dan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN belum optimal
8. Masih belum optimalnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah sehingga level maturitas SPIP masih pada tingkat berkembang;
9. Masih rendahnya efisiensi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
10. Masih terjadinya praktik-praktik pungli yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat;
11. Tingginya jumlah pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah desa;
12. Belum memadainya Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan;
13. Masih tingginya pandemic Covid-19 yang menyebabkan dibatasinya pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan peran APIP dalam memberikan peringatan dini (early warning system) melalui pengawasan dan consulting partner;
- b. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- c. Peningkatan peran pengawasan APIP dalam mengawal implementasi SPIP;
- d. Mewujudkan implementasi SAKIP SKPD yang efisien;
- e. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

- f. Optimalisasi fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten;
- g. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan.
- h. Peningkatan efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- i. Percepatan penanganan Pengaduan Masyarakat;
- j. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu: 1) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan 3) penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENGAWASAN					UNSUR PENGAWASAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					INSPEKTORAT DAERAH					
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Baik	28,694,743,705	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Baik	28,694,743,705	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen	15 Jenis Dokumen	116,224,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen	15 Jenis Dokumen	116,224,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	24,974,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Itdakab	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	24,974,000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Dokumen Hasil Survei	1 Dokumen	91,250,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Itdakab	1. Jumlah Dokumen Hasil Survei	1 Dokumen	91,250,000	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	6 Dokumen	-		Itdakab	2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	6 Dokumen	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	97 Orang	15,293,776,046	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	97 Orang	15,293,776,046	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	97 Orang	15,281,776,046	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Itdakab	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	97 Orang	15,281,776,046	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	12,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Itdakab	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	12,000,000	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Tenaga Keamanan	6 Orang	148,387,909	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Tenaga Keamanan	6 Orang	148,387,909	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Tenaga Keamanan	6 Orang	148,387,909	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Itdakab	Jumlah Tenaga Keamanan	6 Orang	148,387,909	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pemenuhan Aspek Penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	1,709,271,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pemenuhan Aspek Penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	1,709,271,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Pakaian Lapangan	110 Buah	171,461,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Itdakab	1. Jumlah Pakaian Lapangan	110 Buah	171,461,000	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Pakaian Batik	240 Orang			Itdakab	2. Jumlah Pakaian Batik	240 Orang		-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3. Jumlah Pakaian Korpri	110 Lembar			Itdakab	3. Jumlah Pakaian Korpri	110 Lembar		-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	4. Jumlah Pakaian Olahraga	110 Stel			Itdakab	4. Jumlah Pakaian Olahraga	110 Stel		-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah auditor yang mengikuti sertifikasi profesi	10 Orang	1,537,810,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah auditor yang mengikuti sertifikasi profesi	10 Orang	1,537,810,000	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah pelatihan yang diikuti	5 Jenis			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah pelatihan yang diikuti	5 Jenis		-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3. Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	7 Kali			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3. Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	7 Kali		-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah jasa administrasi umum perangkat daerah	7 Jenis	1,026,208,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah jasa administrasi umum perangkat daerah	7 Jenis	1,026,208,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7,277,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7,277,000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59 Jenis	219,571,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59 Jenis	219,571,800	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	7,981,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	7,981,500	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Barang Cetakan	7 Jenis	206,424,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Barang Cetakan	7 Jenis	206,424,600	-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Penggandaan /FC	370.582 Lembar			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Penggandaan /FC	370.582 Lembar		-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar	3 Jenis	10,493,600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar	3 Jenis	10,493,600	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Publikasi di Media Cetak	5 Kali			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Publikasi di Media Cetak	5 Kali		-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	10.600 Orang	225,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	10.600 Orang	225,000,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	200 OH	349,460,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	200 OH	349,460,000	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300 OH			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300 OH		-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis	150,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis	150,000,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Meubeulair	1 Set	150,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Meubeulair	1 Set	150,000,000	-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	303,676,250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	303,676,250	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1200 Buah	6,000,000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1200 Buah	6,000,000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	144,999,600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	144,999,600	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	36 Unit	24,840,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	36 Unit	24,840,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Alat Kebersihan	6 Per Ruang	127,836,650	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Alat Kebersihan	6 Per Ruang	127,836,650	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Tenaga Kebersihan	3 Orang			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Tenaga Kebersihan	3 Orang		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Jenis	9,947,200,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Jenis	9,947,200,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan	24 Unit	97,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan	24 Unit	97,200,000	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan	19 Unit			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan	19 Unit		
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3. Jumlah Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional	43 Unit			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3. Jumlah Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional	43 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung yang Dibangun	1 Gedung	9,850,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung yang Dibangun	1 Gedung	9,850,000,000	-
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Baik	10,194,412,000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Baik	10,194,412,000	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Cakupan Pengawasan Internal	6 Jenis	9,119,257,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Cakupan Pengawasan Internal	6 Jenis	9,119,257,000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	75 Laporan	3,645,088,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	75 Laporan	3,645,088,000	-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2.Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2.Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-		-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3.Jumlah Laporan Hasil Reviu	5 Jenis			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3.Jumlah Laporan Hasil Reviu	5 Jenis		-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	4. Jumlah LHE	4 Jenis			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	4. Jumlah LHE	4 Jenis		-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	5. Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	-			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	5. Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	-		-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	6. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP level terdefinisi	-			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	6. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP level terdefinisi	-		-
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	5 Jenis	3,128,261,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	5 Jenis	3,128,261,000	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah LHR	7 Jenis			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah LHR	7 Jenis		-
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah LHR	1 Laporan	22,425,000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah LHR	1 Laporan	22,425,000	-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah LHR	2 Jenis	249,250,000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah LHR	2 Jenis	249,250,000	-
	Pengawasan Desa	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	421 Laporan	1,170,400,000	Pengawasan Desa	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	421 Laporan	1,170,400,000	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut	500 BAT	903,833,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut	500 BAT	903,833,000	-
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Cakupan Pengawasan Tertentu	8 Jenis	1,075,155,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Cakupan Pengawasan Tertentu	8 Jenis	1,075,155,000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	8 Jenis	1,075,155,000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	8 Jenis	1,075,155,000	-
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	87%	1,294,855,100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	87%	1,294,855,100	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan	1 Rumusan	300,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan	1 Rumusan	300,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis	3 Laporan	300,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis	3 Laporan	300,000,000	-
2	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	4 Kegiatan	994,855,100	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	4 Kegiatan	994,855,100	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	2 Jenis	223,850,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	2 Jenis	223,850,000	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	1 Laporan	87,350,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	1 Laporan	87,350,000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah laporan pencegahan tindak pidana korupsi	2 Jenis	365,320,100	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah laporan pencegahan tindak pidana korupsi	2 Jenis	365,320,100	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah laporan sapu bersih pungutan liar	2 Jenis			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah laporan sapu bersih pungutan liar	2 Jenis		-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	3 Jenis	318,335,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	3 Jenis	318,335,000	-
		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas	1 Laporan			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2. Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas	1 Laporan		-
					40,184,010,805					40,184,010,805	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Garut. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TIDAK ADA				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun diatur dengan sebuah Peraturan Menteri dalam Negeri. Peraturan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah pada suatu tahun anggaran. Terakhir, kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan adalah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Daerah Jenderal Kementerian/ Inspektorat Daerah Utama/Inspektorat Daerah Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi/Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Inspektorat Kabupaten Garut, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Inspektorat adalah:

“Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan Intern”

Adapun keterkaitan tujuan Inspektorat dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Inspektorat Daerah, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022.

Adapun sasaran dari tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Inspektorat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan Intern	1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan	Baik
		2. Meningkatkan Profesionalisme Pengawasan	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Baik

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Peraturan Perundang-undangan tentang pemutakhirannya. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai institusi yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Garut berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	UNSUR PENGAWASAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Kab Garut	Baik	10.194.412.000	APBD Kab	-	Sangat Baik	11.213.853.200
6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Pengawasan Internal	Kab Garut	6 Jenis	9.119.257.000	APBD Kab	-	6 Jenis	10.031.182.700
6.01.02.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Kab Garut	75 Laporan	3.645.088.000	APBD Kab	-	75 Laporan	4.009.596.800
		2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Kab Garut	-			-	-	
		3. Jumlah Laporan Hasil Reviu	Kab Garut	5 Jenis			-	5 Jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Jumlah LHE	Kab Garut	4 Jenis			-	4 Jenis	
		5. Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	Kab Garut	-			-	-	
		6. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP level terdefinisi	Kab Garut	-			-	-	
6.01.02.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Kab Garut	5 Jenis	3.128.261.000	APBD Kab	-	5 Jenis	3.441.087.100
		Jumlah LHR	Kab Garut	7 Jenis			-	7 Jenis	
6.01.02.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR	Kab Garut	1 Laporan	22.425.000	APBD Kab	-	1 Laporan	24.667.500
6.01.02.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR	Kab Garut	2 Jenis	249.250.000	APBD Kab	-	2 Jenis	274.175.000
6.01.02.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kab Garut	421 LHP	1.170.400.000	APBD Kab	-	421 LHP	1.287.440.000
6.01.02.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut	Kab Garut	500 BAT	903.833.000	APBD Kab	-	500 BAT	994.216.300
6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pengawasan Tertentu	Kab Garut	8 Jenis	1.075.155.000	APBD Kab	-	8 Jenis	1.182.670.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Kab Garut	8 Jenis	1.075.155.000	APBD Kab	-	8 Jenis	1.182.670.500
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kab Garut	87%	1.294.855.100	APBD Kab		89%	1.424.340.610
6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan	Kab Garut	1 Rumusan	300.000.000	APBD Kab	-	1 Rumusan	330.000.000
6.01.03.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan	Kab Garut	3 Laporan	300.000.000	APBD Kab	-	3 Laporan	330.000.000
6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kab Garut	4 Kegiatan	994.855.100	APBD Kab	-	4 Kegiatan	1.094.340.610
6.01.03.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	Kab Garut	2 Jenis	223.850.000	APBD Kab	-	2 Jenis	246.235.000
6.01.03.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi, verifikasi dan Penilaian PMPRB	Kab Garut	1 Laporan	87.350.000	APBD Kab		1 Laporan	96.085.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah laporan pencegahan tindak pidana korupsi	Kab Garut	2 Jenis	365.320.100	APBD Kab	-	2 Jenis	401.852.110
		2. Jumlah laporan sapu bersih pungutan liar	Kab Garut	2 Jenis			-	2 Jenis	
6.01.03.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1. Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Garut	3 Laporan	318.335.000	APBD Kab	-	3 Laporan	350.168.500
		2. Partisipasi Survei Penilaian Integritas Pemda	Kab Garut	1 Laporan			-	1 Laporan	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Itidakab	Baik	28.694.743.705	APBD Kab		Sangat Baik	31.729.218.076
6.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Itidakab	15 Jenis Dokumen	116.224.000	APBD Kab	-	15 Jenis Dokumen	127.846.400
6.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Itidakab	8 Dokumen	24.974.000	APBD Kab	-	8 Dokumen	27.471.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Survei	Itdakab	1 Dokumen	91.250.000	APBD Kab	-	1 Dokumen	100.375.000
		2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Itdakab	6 Dokumen	-		-	6 Dokumen	
6.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Itdakab	97 Orang	15.293.776.046	APBD Kab		97 Orang	16.823.153.651
6.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Itdakab	97 Orang	15.281.776.046	APBD Kab	-	97 Orang	16.809.953.651
6.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Itdakab	1 Laporan	12.000.000	APBD Kab	-	1 Laporan	13.200.000
6.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Keamanan	Itdakab	6 Orang	148.387.909	APBD Kab	-	6 Orang	163.226.700
6.01.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan	Itdakab	6 Orang	148.387.909	APBD Kab	-	6 Orang	163.226.700
6.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Aspek Penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah	Itdakab	2 Jenis	1.709.271.000	APBD Kab	-	2 Jenis	1.880.198.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Lapangan	Itdakab	110 Buah	171.461.000	APBD Kab	-	110 Buah	188.607.100
		2. Jumlah Pakaian Batik	Itdakab	240 orang			-	240 Buah	
		3. Jumlah Pakaian Korpri	Itdakab	110 Lembar			-	110 Lembar	
		4. Jumlah Pakaian Olahraga	Itdakab	110 Stel			-	110 Stel	
6.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah auditor yang mengikuti sertifikasi profesi	BPKP/BPSD M/Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya'	10 Orang	1.537.810.000	APBD Kab	-	10 Orang	1.691.591.000
		2. Jumlah Pelatihan yang diikuti	BPKP/BPSD M/Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya'	5 Jenis			-	5 Jenis	
		3. Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan	Itdakab	7 Kali			-	7 Kali	
6.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi umum perangkat daerah	Itdakab	7 Jenis	1.026.208.500	APBD Kab		7 Jenis	1.128.829.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Itdakab	7 Jenis	7.277.000	APBD Kab	-	7 Jenis	8.004.700
6.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Itdakab	59 Jenis	219.571.800	APBD Kab	-	59 Jenis	241.528.980
6.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Itdakab	7 Jenis	7.981.500	APBD Kab	-	7 Jenis	8.779.650
6.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Barang Cetakan	Itdakab	7 Jenis	206.424.600	APBD Kab	-	7 Jenis	227.067.060
		2. Jumlah Penggandaan /FC	Itdakab	370.582 Lembar			-	370.582 Lembar	
6.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar	Itdakab	3 Jenis	10.493.600	APBD Kab	-	3 Jenis	11.542.960
		2. Jumlah Publikasi di Media Cetak	Itdakab	5 Kali			-	5 Kali	
6.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	Itdakab	10.600 Orang	225.000.000	APBD Kab	-	10.600 Orang	247.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Kab Garut	300 OH	349.460.000	APBD Kab	-	300 OH	384.406.000
		2. Jumlah Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Kab Garut	200 OH			-	200 OH	
6.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Itidakab	1 Jenis	150.000.000	APBD Kab	-	1 Jenis	165.000.000
6.01.01.07.05	Pengadaan Meubeulair	Jumlah Meubeulair	Itidakab	1 Set	150.000.000	APBD Kab	-	1 Set	165.000.000
6.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Itidakab	4 Jenis	303.676.250	APBD Kab	-	4 Jenis	334.043.875
6.01.01.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat/materai	Itidakab	1200 Buah	6.000.000	APBD Kab	-	1200 Buah	6.600.000
6.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Itidakab	4 Jenis	144.999.600	APBD Kab	-	4 Jenis	159.499.560
6.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang Diperbaiki	Itidakab	36 Unit	24.840.000	APBD Kab	-	36 Unit	27.324.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Tenaga Kebersihan	Itdakab	3 Orang	127.836.650	APBD Kab	-	3 Orang	140.620.315
		2. Jumlah Alat Kebersihan	Itdakab	6 Per Ruang				6 Per Ruang	
6.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Itdakab	3 Jenis	9.947.200.000	APBD Kab	-	3 Jenis	11.106.920.000
6.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional	Itdakab	43 Unit	97.200.000	APBD Kab	-	43 Unit	106.920.000
		2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan	Itdakab	24 Unit				24 Unit	
		3. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan	Itdakab	19 Unit				19 Unit	
6.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	Itdakab	1 Gedung	9.850.000.000	APBD Kab	-	1 Gedung	11.000.000.000
					40.184.010.805	APBD Kab			44.367.411.886

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang merupakan implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), yang kemudian tata cara penyusunan dan sistemika penulisiannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan pagu dana indikatif serta sumber dananya.

Adapun Rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan Intern				Indeks Penguatan Pengawasan	N/A	N/A	-	5,5	30.296.671.946	6	40.184.010.805	6,5	44.367.399.000	7	48.803.937.000	7	163.652.018.751		
	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan			Indeks Kepuasan Pengawasan	Baik	Baik	-	Baik	10.351.724.900	Baik	11.489.267.100	Sangat Baik	12.638.191.000	Sangat Baik	13.902.007.000	Sangat baik	48.381.190.000	Inspektur	
		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Baik	Baik	-	Baik	9.194.412.000	Baik	10.194.412.000	Sangat Baik	11.213.851.000	Sangat Baik	12.335.234.000	Sangat Baik	42.937.909.000	Irban	
		6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Pengawasan Internal	N/A	N/A	-	6 Jenis	8.119.257.000	6 Jenis	9.119.257.000	6 Jenis	10.031.181.000	6 Jenis	11.034.297.000	6 Jenis	38.303.992.000	Irban	
		6.01.02.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	-	-	-	75 Laporan	3.645.088.000	75 Laporan	3.645.088.000	75 Laporan	4.009.596.000	75 Laporan	4.410.556.000	300 Laporan	15.710.328.000	Irban	Kab Garut
				2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	3 Jenis		-		-		-		3 Jenis			
				3. Jumlah Laporan Hasil Reviu	-	-	-	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		20 Jenis			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				4. Jumlah LHE	-	-	-	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		16 Jenis			
				5. Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	-	-	-	-								-			
				6. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP level terdefinisi	-	-	-	-								-			
		6.01.02.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	2 Jenis	2.128.261.000	5 Jenis	3.128.261.000	5 Jenis	3.441.087.000	5 Jenis	3.785.195.000	5 Jenis	12.482.804.000	Urban	Kab Garut
				Jumlah LHR	-	-	-	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis			
		6.01.02.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR	-	-	-	1 Laporan	22.425.000	1 Laporan	22.425.000	1 Laporan	24.667.000	1 Laporan	27.133.000	4 Laporan	96.650.000	Urban	Kab Garut
		6.01.02.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR	-	-	-	2 Jenis	249.250.000	2 Jenis	249.250.000	2 Jenis	274.175.000	2 Jenis	301.592.000	2 Jenis	1.074.267.000	Urban	Kab Garut
		6.01.02.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	-	-	-	421 LHP	1.170.400.000	421 LHP	1.170.400.000	421 LHP	1.287.440.000	421 LHP	1.416.184.000	1684 LHP	5.044.424.000	Urban	Kab Garut
		6.01.02.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut	-	-	-	499 BAT	903.833.000	500 BAT	903.833.000	500 BAT	994.216.000	500 BAT	1.093.637.000	1999 BAT	3.895.519.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Kab Garut
		6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pengawasan Tertentu	N/A	N/A	-	8 Jenis	1.075.155.000	8 Jenis	1.075.155.000	8 Jenis	1.182.670.000	8 Jenis	1.300.937.000	8 Jenis	4.633.917.000	Urban Investigasi & Pengaduan	Kab Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.02.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	8 Laporan	1.075.155.000	8 Laporan	1.075.155.000	8 Laporan	1.182.670.000	8 Laporan	1.300.937.000	32 Laporan	4.633.917.000	Irbn Investigasi & Pengaduan	Kab Garut
		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	N/A	85%	-	85%	1.157.312.900	87%	1.294.855.100	89%	1.424.340.000	91%	1.566.773.000	93%	5.443.281.000	Irbn	
		6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan	N/A	N/A	-	1 Rumusan	162.457.800	1 Rumusan	300.000.000	1 Rumusan	330.000.000	1 Rumusan	363.000.000	4 Rumusan	1.155.457.800	Sekretariat	Itda
		6.01.03.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan	-	-	-	3 Laporan	162.457.800	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	330.000.000	3 Laporan	363.000.000	12 Laporan	1.155.457.800	Sekretariat	
		6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	N/A	N/A	-	4 Kegiatan	994.855.100	4 Kegiatan	994.855.100	4 Kegiatan	1.094.340.000	4 Kegiatan	1.203.773.000	16 Kegiatan	4.287.823.200	Irbn dan Irbn Investigasi & Pengaduan	Itda
		6.01.03.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	-	-	-	2 Laporan	223.850.000	2 Laporan	223.850.000	2 Laporan	246.235.000	2 Laporan	270.858.000	8 Laporan	964.793.000	Irbn	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.01.03.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian PMPRB	-	-	-	1 Laporan	87.350.000	1 Laporan	87.350.000	1 Laporan	96.085.000	1 Laporan	105.693.000	4 Laporan	376.478.000	Irban Investigasi & Pengaduan	
		6.01.03.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah laporan pencegahan tindak pidana korupsi	-	-	-	2 Laporan	365.320.100	1 Laporan	365.320.100	1 Laporan	401.852.000	1 Laporan	442.037.000	5 Laporan	1.574.529.200	Irban Investigasi & Pengaduan	
				2. Jumlah laporan sapu bersih pungutan liar	-	-	-	2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan		Irban Investigasi & Pengaduan	
		6.01.03.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1. Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	3 Laporan	318.335.000	3 Laporan	318.335.000	3 Laporan	350.168.000	3 Laporan	385.185.000	12 Laporan	1.372.023.000	Irban Investigasi & Pengaduan	
				2. Partisipasi Survei Penilaian Integritas Pemda	-	-	-	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		4 Kali		Irban Investigasi & Pengaduan	
	2. Meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)			Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Baik	Baik	-	Baik	19.944.947.046	Baik	28.694.743.705	Sangat Baik	31.729.208.000	Sangat Baik	34.901.930.000	Sangat Baik	115.270.828.751	Inspektur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Baik	Baik	-	Baik	19.944.947.046	Baik	28.694.743.705	Sangat Baik	31.729.208.000	Sangat Baik	34.901.930.000	Sangat Baik	115.270.828.751	Sekretariat	Itda
		6.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	N/A	N/A	-	15 Jenis Dokumen	116.224.000	15 Jenis Dokumen	116.224.000	15 Jenis Dokumen	127.846.000	15 Jenis Dokumen	140.630.000	15 Jenis Dokumen	500.924.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	-	-	8 Dokumen	24.974.000	8 Dokumen	24.974.000	8 Dokumen	27.471.000	8 Dokumen	30.218.000	32 Dokumen	107.637.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Survei	-	-	-	1 Dokumen	91.250.000	1 Dokumen	91.250.000	1 Dokumen	100.375.000	1 Dokumen	110.412.000	4 Dokumen	393.287.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
				2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	-	-	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	24 Dokumen	-		
		6.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	N/A	N/A	-	95 Orang	15.293.776.046	97 Orang	15.293.776.046	97 Orang	16.823.153.000	97 Orang	18.505.420.000	483 Orang	65.916.125.092	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	-	-	-	95 Orang	15.281.776.046	97 Orang	15.281.776.046	97 Orang	16.809.953.000	97 Orang	18.490.900.000	386 Orang	65.864.405.092	Sub Bag Keuangan	Itda
		6.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	-	-	-	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	13.200.000	1 Laporan	14.520.000	4 Laporan	51.720.000	Sub Bag Keuangan	Itda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Keamanan	N/A	N/A	-	6 Orang	148.387.909	6 Orang	148.387.909	6 Orang	163.226.000	6 Orang	179.549.000	24 Orang	639.550.818	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan	-	-	-	6 Orang	148.387.909	6 Orang	148.387.909	6 Orang	163.226.000	6 Orang	179.549.000	24 Orang	639.550.818	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Aspek Penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	-	2 Jenis	1.709.271.000	2 Jenis	1.709.271.000	2 Jenis	1.880.198.000	2 Jenis	2.068.217.000	2 Jenis	7.366.957.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Lapangan	-	-	-	110 Buah	171.461.000	110 Buah	171.461.000	110 Buah	188.607.000	110 Buah	207.467.000	440 Buah	738.996.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Pakaian Batik	-	-	-	240 Buah		240 Buah		240 Buah		240 Buah	960 Buah				
				3. Jumlah Pakaian Korpri	-	-	-	110 Lembar		110 Lembar		110 Lembar		110 Lembar	440 Lembar				
				4. Jumlah Pakaian Olahraga	-	-	-	110 Stel		110 Stel		110 Stel		110 Stel	440 Stel				
		6.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan minimal 120 Jam	-	-	-	97 Orang	1.537.810.000	97 Orang	1.537.810.000	97 Orang	1.691.591.000	97 Orang	1.860.750.000	388 Orang	6.627.961.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Diklat/Bimtek Pengawasan yang diikuti	-	-	-	2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat	2 Jenis Diklat				
				3. Jumlah Pelatihan Kerja Sendiri (PKS) yang Dilaksanakan	-	-	-	7 Kali		7 Kali		7 Kali		7 Kali	7 Kali				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi umum perangkat daerah	N/A	N/A	-	7 Jenis	1.026.208.500	7 Jenis	1.026.208.500	7 Jenis	1.128.822.000	7 Jenis	1.241.574.000	7 Jenis	4.422.813.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	7 Jenis	7.277.000	7 Jenis	7.277.000	7 Jenis	8.000.000	7 Jenis	8.800.000	7 Jenis	31.354.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
		6.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	59 Jenis	219.571.800	59 Jenis	219.571.800	59 Jenis	241.528.000	59 Jenis	265.681.000	59 Jenis	946.352.600	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
		6.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	-	7 Jenis	7.981.500	7 Jenis	7.981.500	7 Jenis	8.779.000	7 Jenis	9.600.000	7 Jenis	34.342.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
		6.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Barang Cetakan	-	-	7 Jenis	206.424.600	7 Jenis	206.424.600	7 Jenis	227.067.000	7 Jenis	249.700.000	7 Jenis	889.616.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
				2. Jumlah Penggandaan /FC	-	-	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	1.482.328 Lembar					
		6.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar	-	-	3 Jenis	10.493.600	3 Jenis	10.493.600	3 Jenis	11.542.000	3 Jenis	12.697.000	3 Jenis	45.226.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
				2. Jumlah Publikasi di Media Cetak	-	-	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	20 Kali					
		6.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	-	-	10.600 Orang	225.000.000	10.600 Orang	225.000.000	10.600 Orang	247.500.000	10.600 Orang	272.250.000	42.400 Orang	969.750.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	300 OH	349.460.000	300 OH	349.460.000	300 OH	384.406.000	300 OH	422.846.000	1.200 OH	1.506.172.000	Sub Bag Umum & Kepegaw aian	Itda	
				2. Jumlah Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	-	-	200 OH		200 OH		200 OH		200 OH		800 OH				
		6.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	-	-	1 Jenis	150.000.000	1 Jenis	165.000.000	1 Jenis	181.500.000	1 Jenis	496.500.000	Sub Bag Umum & Kepegaw aian		
		6.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeulair	-	-	-	-	1 Set	150.000.000	1 Set	165.000.000	1 Set	181.500.000	3 Set	496.500.000	Sub Bag Umum & Kepegaw aian		
		6.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	-	4 Jenis	303.676.250	4 Jenis	303.676.250	4 Jenis	334.043.000	4 Jenis	367.440.000	4 Jenis	1.308.835.500	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat/materai	-	-	1200 Buah	6.000.000	1200 Buah	6.000.000	1200 Buah	6.600.000	1200 Buah	7.260.000	4.800 Buah	25.860.000	Sub Bag Umum & Kepegaw aian	Itda	
		6.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	4 Jenis	144.999.600	4 Jenis	144.999.600	4 Jenis	159.499.000	4 Jenis	175.450.000	4 Jenis	624.948.200	Sub Bag Umum & Kepegaw aian	Itda	
		6.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang Diperbaiki	-	-	36 Unit	24.840.000	36 Unit	24.840.000	36 Unit	27.324.000	36 Unit	30.050.000	144 Unit	107.054.000	Sub Bag Umum & Kepegaw aian	Itda	
		6.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Tenaga Kebersihan	-	-	3 Orang	127.836.650	3 Orang	127.836.650	3 Orang	140.620.000	3 Orang	154.680.000	12 Orang	550.973.300	Sub Bag Umum & Kepegaw aian		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
																	aian		
				2. Jumlah Alat Kebersihan	-	-	-	6 Per Ruang		6 Per Ruang		6 Per Ruang		6 Per Ruang		24 Per Ruang			
		6.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	N/A	-	3 Jenis	1.347.403.341	3 Jenis	9.947.200.000	3 Jenis	11.106.920.000	3 Jenis	12.217.600.000	3 Jenis	34.619.123.341	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	38 Unit	97.200.000	43 Unit	97.200.000	43 Unit	106.920.000	43 Unit	117.600.000	167 Unit	418.920.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Itda
				2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	5 Unit		24 Unit		24 Unit		24 Unit		77 Unit			
				3. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	9 Unit		19 Unit		19 Unit		19 Unit		66 Unit			
		6.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	-	-	-	1 Gedung	1.250.203.341	1 Gedung	9.850.000.000	1 Gedung	11.000.000.000	1 Gedung	12.100.000.000	1 Gedung	34.200.203.341	Sub Bag Umum & Kepegawain	Itda
							-		30.296.671.946		40.184.010.805		44.367.399.000		48.803.937.000		163.652.018.751		

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2022 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran, guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut maupun dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut pada Tahun 2022 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Garut sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh stakeholders pemerintah Kabupaten Garut dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Inspektorat. Diharapkan semua elemen kelembagaan Inspektorat dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 0,5 % dari APBD dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota dan

Provinsi. Hal ini sejalan dengan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008, surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/435/A.2/IJ tanggal 07 April 2017 dan surat Direktut Jenderal Depdagri Nomor 700/503/A1/SJ tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Garut mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN